

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG TIDAK
MENDAPATKAN PENDAMPINGAN PENASIHAT HUKUM
DI DALAM PERSIDANGAN PIDANA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor :
619/Pid.B/2010/PN.Sda.)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh:

YAZID ASYHARI
NPM . 0771010164

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2011**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNYA, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MENDAPATKAN PENASIHAT HUKUM DI DALAM PERSIDANGAN PIDANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 619/Pid.B/2010/PN.Sda.) ”** dapat terselesaikan.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasioanal “Veteran” Jawa Timur.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak H. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Wadek I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Subani, S.H., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan Selaku Dosen Pembimbing Utama.

4. Ibu Yana Indawati, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pembuatan proposal sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Ibnu Fauzi, SH. selaku Ketua Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Sidoarjo yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
7. Bapak Agus Dwi Hartanto, Bc.IP, SH. selaku Kepala Sub Sie Pembinaan dan Pendidikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
8. Kedua orang tuaku tercinta, kakakku, adikku tersayang dan seluruh saudara-saudara yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doa dan restunya selama ini.
9. Teman-teman seperjuangan Ario, Rina, Tian, Ajeng, Nanda, Stella, Yudha, dan seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan di sisi Allah SWT sebagai amal ibadah, Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan. *Amin Yaa Rabbal ‘Alamiin.*

Surabaya, April 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI ...	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAKSI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana	7
a. Hukum Acara Pidana	7
b. Asas-asas Hukum Acara Pidana	10
c. Persidangan Pidana	12
d. Terdakwa	12
e. Penasihat Hukum	14

2. Pendampingan Hukum	16
3. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	18
a. Dasar Hukum Perlindungan Hukum	18
b. Macam-macam Perlindungan Hukum	23
1. Perlindungan Hukum Pasif	23
a. Perlindungan HAM Dalam Hukum Pidana	23
b. Pemberian Bantuan Hukum Struktural	24
2. Perlindungan Hukum Aktif	26
a. Upaya Hukum	26
b. Keseimbangan upaya paksa	28
4. Hak-hak Terdakwa	32
a. Hak-hak Terdakwa Menurut KUHAP	32
b. Hak-hak Terdakwa Di Luar Ketentuan KUHAP	36
5. Sistem Pembuktian.....	37
6. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	42
a. Pengertian Narkotika	42
b. Jenis-jenis Narkotika	43
7. Tindak Pidana Narkotika	44
F. Metode Penelitian	45
1. Jenis Penelitian	45
2. Pendekatan Masalah	45
3. Sumber Data	47
4. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	48

5. Metode Analisis Data	49
G. Sistematika Penulisan	49
BAB II Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa Yang Diancam	
Pidana 5 Tahun Atau Lebih Yang Tidak Didampingi Penasihat	
Hukum Pada Saat Proses Persidangan Di Pengadilan.....	51
A. Disposisi Kasus Perkara No. 619/Pid.B/2010/PN.Sda.	51
1. Identitas Terdakwa	51
2. Berita Acara Penolakan Didampingi Penasihat Hukum	51
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	52
4. Keterangan Terdakwa	54
B. Analisa Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa Tanpa	
Didampingi Penasihat Hukum Atas Kasus Perkara No :	
619/Pid.B/2010/PN. Sda.	55
BAB III Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terdakwa Tidak Didampingi	
Penasihat Hukum.....	67
A. Faktor Internal Yang Menyebabkan Terdakwa Tidak	
Didampingi Penasihat Hukum	67
B. Faktor Eksternal Yang Menyebabkan Terdakwa Tidak	
Didampingi Penasihat Hukum	69
C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No :	
619/Pid.B/2010/PN.Sda. Atas Terdakwa Yang Tidak	
Didampingi Penasihat Hukum.	72

BAB IV Penutup	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Melakukan Riset Di Pengadilan Negeri Kelas
IA Khusus Sidoarjo
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Melakukan Riset Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo
- Lampiran 3 : Berkas Acara Penolakan Didampingi Penasihat Hukum
- Lampiran 4 : Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor :
619/Pid.B/2010/PN.Sda.
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 6 : Hasil Wawancara Dengan Terpidana Hadi Kusumo Di
Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Yazid Asyhari
NPM : 0771010164
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 20 Desember 1988
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG TIDAK
MENDAPATKAN PENDAMPINGAN PENASIHAT HUKUM
DI DALAM PERSIDANGAN PIDANA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor :
619/Pid.B/2010/PN.Sda.)**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi terdakwa yang terkena ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang tidak didampingi dengan penasihat hukum saat proses di pengadilan dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terdakwa tidak didampingi penasihat hukum.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan menggunakan dua jenis metode pengumpulan data, yaitu metode studi kepustakaan dan metode wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan cara metode diskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi terdakwa yang terkena ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang tidak didampingi dengan penasihat hukum saat proses di pengadilan masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP. Dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terdakwa tidak didampingi penasihat hukum. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti serta dapat dipergunakan sebagai bahan masukan terhadap para pihak yang mengalami dan terlibat langsung dengan kasus ini.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Terdakwa, Pendampingan Penasihat Hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)¹. Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keserasian antara ketertiban dengan ketentraman². Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Konsekuensi dari dianutnya hukum sebagai ideologi oleh suatu negara adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, maka hukum juga wajib memberikan timbal balik terhadap negara yang menerimanya sebagai ideologi, dengan cara memperhatikan

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 1989, h. 346

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2007, h. 179

kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penciptaan keadilan dalam masyarakat serta memberikan pelayanan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat, hukum tidak selalu bisa memberikan keputusannya dengan segera, hukum membutuhkan waktu untuk menimbang-nimbang yang bisa memakan waktu lama sekali, guna mencapai keputusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Hanya saja hukum acara pidana atau yang juga dikenal dengan sebutan hukum pidana formal lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Sedangkan hukum pidana (materiil) lebih tertuju pada peraturan hukum yang menunjukan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Walaupun hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Terhadap penyimpangan-

penyimpangan hukum ini tentunya harus ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sehingga ideologi Indonesia sebagai negara hukum benar-benar terwujud.

Pada Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHAP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah: “Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Melalui hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Namun di dalam hukum acara pidana terdapat asas praduga tidak bersalah dan asas *legalitas*. Asas atau prinsip *legalitas* dengan jelas disebut dalam *konsideren* KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang berbunyi : ”Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat dengan HAM) serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”³. Asas tersebut juga dimuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan sebagai berikut :

”Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Kemudian pada pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) yang berbunyi : ”Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”⁴.

Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/ atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap)⁵.

Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti yang tercantum dalam Pasal 50 KUHP sampai dengan Pasal 68 KUHP, yaitu : hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap

³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Kesepuluh, Jakarta, 2008, h.36

⁴ Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penerbit Bumi Aksara, Cetakan kedua puluh enam, Jakarta, 2007, h. 3

⁵ Asa Mandiri, *Pedoman Pelaksanaan KUHP*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2007, h.10

penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga.

Mengenai hak-hak terdakwa tersebut terdapat salah satu hak terdakwa tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang tercantum pada Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP yaitu: Pertama dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Kedua Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuan secara cuma-cuma. Namun berkaitan dengan hak terdakwa yang tercantum pada Pasal 56 KUHAP tersebut, dalam praktiknya masih terdapat terdakwa yang tidak diberikan pendampingan penasihat hukum oleh para pejabat penegak hukum (penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang “Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak Mendapatkan Pendampingan Penasihat Hukum Di Persidangan Pidana”.

B. Perumusan Masalah :

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak Mendapatkan Pendampingan Penasihat Hukum Di Persidangan Pidana”, akan dirumuskan sebagai berikut ini :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi terdakwa yang terkena ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang tidak didampingi dengan penasihat hukum saat proses di pengadilan?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terdakwa tidak didampingi penasihat hukum?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi terdakwa yang terkena ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang tidak didampingi dengan penasihat hukum saat proses di pengadilan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terdakwa tidak didampingi penasihat hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat penulis ambil dalam penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis
 - Untuk memberi sumbangan pengetahuan dan pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya hukum acara pidana, terutama yang terkait dengan pemenuhan hak-hak terdakwa yang diancam pidana 5 tahun atau lebih di dalam memperoleh pendampingan penasihat hukum.

b. Manfaat Praktis

- Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan penting bagi masyarakat mengenai hak-hak terdakwa khususnya untuk mendapatkan pendampingan penasihat hukum dalam persidangan pidana.
- Untuk dapat dipakai sebagai pedoman bagi para akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap terdakwa sebagai haknya.

E. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana

a. Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana yang disebut juga hukum pidana formal mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana materiil⁶. Ketentuan-ketentuan hukum acara pidana tertulis secara sistematis dan teratur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Prof Moeljatno⁷, hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang berisikan dasar-dasar dan aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan, bagaimana cara dan prosedur dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.

⁶ R. Abdoel Djamal, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 199

⁷ Sutomo, *Handout Hukum Acara Pidana*, Surabaya, 2008, h.1

Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, hukum acara pidana erat hubungannya dengan hukum pidana⁸. Hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara, bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara yang mengadakan hukum pidana.

Simons mendefinisikan hukum acara pidana yaitu mengatur bagaimana negara dengan alat-alat perlengkapannya mempergunakan haknya menghukum dan menjatuhkan hukuman (memidana)⁹.

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya menegakkan atau mempertahankan hukum pidana materiil (yang lazim disebut “hukum pidana” saja). Jadi hukum acara pidana memuat aturan-aturan tentang bagaimana caranya menerapkan hukum pidana terhadap perkara-perkara pidana¹⁰. Dalam hukum acara pidana diatur segala sesuatu tentang proses pemeriksaan perkara pidana pada semua tingkatan pemeriksaan: di kepolisian, di kejaksaan maupun di pengadilan.

Hukum acara pidana diciptakan sebagai sarana dalam rangka penegakan hukum dan keadilan dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan tenteram dalam masyarakat. Dapat disimpulkan apabila hukum material tidak ditunjang oleh hukum formal (hukum acara)

⁸ *Ibid*, h. 2

⁹ *Ibid*, h. 3

¹⁰ H. Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Cetakan kedua, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 83

jadilah hukum material itu mati¹¹. Tegasnya pengertian Hukum Acara Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana adalah Hukum yang mengatur bagaimana mempertahankan hukum pidana Materiil dalam proses penegakan hukum pidana itu sendiri¹².

Hukum acara pidana merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengenai cara melaksanakan ketentuan hukum pidana, jika ada pelanggaran terhadap norma-norma yang dimaksud oleh ketentuan ini¹³. Pemeriksaan dalam hukum acara pidana yang dikejar adalah kebenaran materiil, dimana suatu pengakuan tanpa didukung oleh alat bukti lain bukanlah merupakan alat bukti mutlak.

Terdapat beberapa tingkatan pemeriksaan dalam melaksanakan hukum acara pidana. Pemeriksaan dalam hukum acara pidana adalah sebagai berikut¹⁴ :

- a. Pemeriksaan pendahuluan (*vooronderzoek*).
 Dalam pemeriksaan pendahuluan ini dikumpulkan bahan-bahan yang mungkin dapat menjadi bukti terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Jumlah dan sifat bahan-bahan ini menentukan apakah si tertuduh akan dituntut atau tidak.
 Dalam pemeriksaan pendahuluan, dipergunakan sebagai pedoman asas-asas sebagai berikut :
 1. Asas kebenaran materiil (kebenaran dan kenyataan) yaitu usaha-usaha yang ditujukan untuk mengetahui apakah benar-benar terjadi pelanggaran atau kejahatan.
 2. Asas *inquisitoir*, yaitu bahan dalam pemeriksaan pendahuluan ini se tertuduh/si tersangka hanyalah merupakan obyek. Khusus

¹¹ Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1983, h. 46

¹² M. Sofyan Lubis, *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan*, Cetakan Pertama, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, h. 10

¹³ A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit PT ERESKO, Bandung, 1995, h. 71

¹⁴ *Ibid*, h. 71-72

asas yang kedua ini hanya berlaku pada waktu masih menggunakan sistem HIR. Setelah mempunyai kodifikasi yang bersifat nasional yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka HIR sepanjang yang mengenai hukum acara pidana ditinggalkan. Dalam sistem KUHAP, terdakwa sudah bisa didampingi pembela.

- b. Pemeriksaan terakhir (*eindonderzoek*) di dalam sidang pengadilan pada tingkat pertama.

Pemeriksaan dalam sidang bertujuan untuk menguji apakah suatu tindak pidana betul-betul terjadi atau apakah bukti-bukti yang diajukan itu sah atau tidak. Berbeda dengan pemeriksaan pendahuluan, maka pada pemeriksaan dalam sidang terdakwa/tertuduh telah dianggap sebagai subyek yang berarti telah mempunyai kedudukan sebagai pihak yang sederajat dengan penuntut umum. Sifat pemeriksaan itu adalah *accusatoir*.

- c. Mamajukan upaya hukum (*rechtsmiddelen*) yang dapat dijalankan terhadap putusan hakim, baik ditingkat pertama maupun pada tingkat banding.

Sesudah perkara diputus oleh hakim, maka apabila jaksa atau terdakwa tidak puas terhadap putusan hakim, mereka dapat mengajukan upaya hukum, dalam hal ini dapat banding ke Pengadilan Tinggi. Kalau keputusan Pengadilan Tinggi belum memuaskan, dapat minta kasasi kepada Mahkamah Agung¹⁵.

- d. Pelaksanaan putusan hakim.

Jika keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya sudah tidak dapat diajukan perlawanan lagi, maka keputusan itu dapat dilaksanakan dan ini merupakan tugas jaksa untuk mengeksekusikan atau melaksanakan putusan hakim.

b. Asas-asas Hukum Acara Pidana

Untuk melaksanakan hukum acara pidana, ada beberapa asas-asas penting yang perlu diketahui. Adapun asas tersebut antara lain¹⁶:

- a. Asas persamaan di muka hukum yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.

¹⁵ *Ibid*, h. 75

¹⁶ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 347

- b. Asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocent* yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak yaitu peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- d. Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya yaitu setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- e. Asas *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu) yaitu suatu mekanisme saling mengawasi di antara sesama aparat penegak hukum untuk terjalinnya hubungan fungsi yang berkelanjutan¹⁷. Berupa terbinanya saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi lain, sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi. Mulai dari penyidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan.

¹⁷ Yahya Harahap, *op.cit.*, h. 47

Atau dapat juga dikatakan sebagai sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan. Sistem tersebut mengatur bagaimana proses berjalannya suatu perkara mulai dari penyelidikan sampai pemasyarakatan¹⁸.

c. Persidangan Pidana

Persidangan Pidana disebut juga dengan pemeriksaan pada tingkat pengadilan merupakan proses beracara di muka hakim (*gerechtelijk onderzoek*) diberi nama pemeriksaan terakhir (*eindonderzoek*). Dalam pemeriksaan terakhir ini yang dituduh (yang tersangka) menjadi yang didakwa (terdakwa, *beklaagde*). Acara di muka hakim ini diakhiri dengan penghukuman (*veroordeling*, pemidanaan) yang dimuat dalam suatu keputusan hakim¹⁹.

Pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dilakukan oleh suatu majelis hakim/hakim tunggal. Proses dan prosedural ini lazim disebut tindakan “mengadili”, yaitu serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut undang-undang (Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 juncto Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 KUHAP, Bab XIV Pasal 145 sampai dengan Pasal 232 KUHAP)²⁰.

d. Terdakwa

KUHAP membedakan tentang pengertian istilah “tersangka” dan “terdakwa”. Perbedaan tersebut dapat ditemukan pada ketentuan Bab I

¹⁸ Arsil, *Hukum Pidana integrated criminal justice system*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6914>, pukul 10:30, tanggal 24 Januari 2011

¹⁹ E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang SH., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesebelas, Penerbit Dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1983, h. 419

²⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan khusus terhadap Surat Dakwaan Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Cetakan Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, h. 42

tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 dan 15 KUHAP yang menentukan bahwa²¹:

Pengertian tentang tersangka, menurut pasal 1 butir 14 KUHAP dirumuskan bahwa pengertian tersangka ialah : "Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

Jadi untuk menetapkan seseorang berstatus sebagai tersangka, cukup didasarkan pada alat bukti permulaan atau bukti awal yang cukup²².

Sedangkan Menurut Pasal 1 ayat 15 KUHAP pengertian terdakwa ialah : "Seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan".

Status terdakwa adalah didasarkan pada alat-alat bukti yang sah serta didasarkan pada berkas perkara hasil penyidikan yang menurut penilaian penuntut umum sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan (pasal 1 butir 14 juncto pasal 139 KUHAP)²³.

Sesuai dengan pengertian atau penafsiran otentik sebagaimana yang tersebut dalam pengertian tersangka dan terdakwa diatas dapat diketahui bahwa seorang terdakwa dapat dipastikan bahwa ia seorang tersangka, sedangkan seorang tersangka belum tentu ia berubah

²¹ *Ibid*, h. 49

²² HMA KUFFAL, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Cetakan Kesebelas, Penerbit UMM Press, Malang, 2010, h. 131

²³ *Ibid*,

menjadi terdakwa, misalnya perkaranya dihentikan penuntutannya. Status tersangka baru berubah menjadi terdakwa setelah penuntut umum melimpahkan perkara tersangka ke pengadilan negeri (Pasal 1 butir 7 juncto 143 ayat (1) KUHAP). Dengan perkataan lain status tersangka berubah menjadi terdakwa setelah ada tindakan penuntut umum²⁴.

e. Penasihat Hukum

Penasihat hukum adalah orang yang memberikan bantuan atau nasihat hukum, baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan penasihat hukum, baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai pengacara/advokat dan pengacara praktek²⁵. Menurut ketentuan KUHAP penasihat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum (Pasal 1 butir 13 KUHAP)²⁶.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tercantum antara lain : "Pembela". Kesatu, orang yang membela. Kedua, ahli hukum yang dipilih atau ditunjuk untuk membela terdakwa di sidang pengadilan, advokat²⁷.

Penasihat Hukum juga diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-

²⁴ *Ibid.*, h. 132

²⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 99

²⁶ HMA KUFFAL, *op.cit.*, h. 151

²⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan Dan Penyidikan*, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan pertama, Jakarta, 2009, h. 56

undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dirumuskan sebagai berikut : "Advokat ialah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini".

Black's Law Dictionary menjelaskan bahwa definisi advokat adalah seseorang yang membantu, membela atau mengajukan tuntutan kepada pihak lainnya.

Penasihat hukum atau advokat sering juga disebut dengan istilah pengacara atau kuasa hukum, kesemuanya merupakan kata benda, subyek. Dalam praktek dikenal juga dengan istilah Konsultan Hukum. Dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat (*advis*) dan pembelaan "mewakili" bagi orang lain yang berhubungan (klien) dengan penyelesaian suatu kasus hukum.

Istilah pengacara berkonotasi jasa profesi hukum yang berperan dalam suatu sengketa yang dapat diselesaikan di luar atau di dalam sidang pengadilan. Dalam profesi hukum, dikenal istilah beracara yang terkait dengan pengaturan hukum acara dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. Istilah pengacara dibedakan dengan istilah Konsultan Hukum yang kegiatannya lebih ke penyediaan jasa konsultasi hukum secara umum²⁸.

²⁸ Anonim, *Pengertian Penasehat Hukum*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pengacara>, pukul 19:25, tanggal 29 Oktober 2010

Pembelaan dilakukan oleh pengacara terhadap institusi formal (peradilan) maupun informal (*diskursus*), atau orang yang mendapat sertifikasi untuk memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana yang telah dirumuskan pada pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad.

Sedangkan istilah kuasa hukum muncul setelah adanya penunjukan penasihat hukum bagi terdakwa dengan adanya surat kuasa khusus dari terdakwa yang kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri yang menyidangkan perkara tersebut atau dapat ditunjuk secara lisan oleh terdakwa di persidangan dan apabila terdakwa seorang yang tidak mampu, dapat didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk pengadilan berdasarkan "penetapan" penunjukan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara itu.

2. Pendampingan Hukum

Untuk mendapatkan bantuan hukum, seseorang tersangka dan atau terdakwa diperbolehkan untuk didampingi seorang atau lebih penasihat hukum²⁹. Dan kepadanya diberikan kebebasan untuk memilih sendiri penasihat hukumnya.

Pada prinsipnya seorang tersangka atau terdakwa diberi kebebasan untuk memilih sendiri penasihat hukumnya atau diberi kebebasan apakah ia akan didampingi penasihat hukum atau tidak. Namun demikian ada

²⁹ Benyamin Asri, *Hak Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Penyidikan, Penuntutan Dan Peradilan*, Edisi Pertama, Penerbit TARSITO, Bandung, 1989, h.48

tersangka atau terdakwa yang oleh undang-undang diwajibkan untuk didampingi oleh penasehat hukum³⁰.

Ketentuan yang mengatur tersangka atau terdakwa yang wajib didampingi oleh penasihat hukum ini dapat dipahami dari ketentuan pasal 56 KUHAP yang selengkapnya berbunyi :

Pasal 56 :

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 56 tersebut di atas adalah sesuai dengan asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam pasal 21 ayat (4) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima belas tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum ditempat itu³¹.

Apabila ditarik kesimpulan dari ketentuan yang mengatur tersangka atau terdakwa yang wajib didampingi penasihat hukum, maka dapat dimengerti bahwa, tersangka atau terdakwa yang wajib didampingi penasihat hukum adalah : (a) diancam dengan pidana mati; (b) diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih; (c) tidak mampu dan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih.

³⁰ *Ibid*, h. 49

³¹ *Ibid*, h. 50

3. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

a. Dasar hukum perlindungan hukum

Dalam tataran normatif konstitusional, aspek kemanusiaan dijabarkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pada Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 menyatakan :

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Pernyataan ini secara eksplisit, walaupun dalam konteks menentang penjajahan, tetapi secara implisit, mengandung pengakuan bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap orang/manusia sebagai individu anggota masyarakat. Selanjutnya, Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945 menyatakan :

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Pernyataan ini mengandung makna yang luas, tidak hanya berkehidupan kebangsaan (berbangsa, bernegara, bermasyarakat) yang bebas, tetapi juga berkehidupan bebas secara perorangan atau individu dalam segala aspek kehidupannya, baik berideologi, berpolitik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Walaupun kemerdekaan dan kebebasan merupakan HAM dan sekaligus merupakan hak asasi masyarakat, bukanlah berarti kebebasan yang liar tanpa batas. Hal ini dapat dipahami dari makna yang terkandung dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. makna yang terkandung dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut adalah kebebasan dan kemerdekaan yang ingin dicapai adalah kebebasan dan kemerdekaan dalam ketertiban/keteraturan atau

kebebasan dan kemerdekaan dalam suasana tertib hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti bahwa disatu sisi, walaupun setiap orang/individu mempunyai kebebasan dan kemerdekaan, disisi lainnya harus menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi (kemerdekaan dan kebebasan) orang lain³².

Penjabaran selanjutnya mengenai konsep perlindungan hukum terhadap HAM diatur dalam batang tubuh UUD 1945 (sesudah amandemen), yaitu :

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia....”

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta

³² O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Penerbit PT Alumni, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Bandung, 2006, h. 117

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi.

Beberapa ketentuan UUD 1945 yang dikutip di atas, memberikan jaminan kepada setiap warga negara atas keamanan dan ketentraman pribadi, perlindungan dari ancaman ketakutan, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Kesemuanya ini bermuara pada prinsip *equality before the law*.

Haris Sucho mengatakan bahwa konsekuensi yang harus dilakukan dari pengaturan HAM dalam beberapa pasal UUD 1945 yang dikutip tersebut adalah baik pengadilan maupun pemerintah memperlakukan orang secara adil. Artinya, tidak seorangpun dapat dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis³³.

Mengacu pada deskripsi mengenai Pembukaan UUD 1945 yang telah tersebut di atas, segala bentuk upaya paksa, perlakuan yang tidak adil dan tidak berdasarkan hukum seperti pengekangan, perampasan, penghinaan, pelecehan dan lain sebagainya, pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM. Dalam konteks Hukum Pidana, pelanggaran HAM terjadi apabila salah satu prasyarat telah dipenuhi, yaitu bahwa pelanggaran tersebut telah diatur dalam peraturan

³³ O.C. Kaligis, *loc.cit.*, h. 20

perundang-undangan. Pandangan ini sesuai dengan asas *nullum crimen sine lege* atau asas legalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas ini merupakan salah satu asas yang fundamental untuk melindungi hak kemerdekaan dan kebebasan seseorang.

Dari ketentuan asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, diturunkan ketentuan lain yang mengatur bahwa seseorang baru dianggap bersalah melakukan suatu tindak pidana hanya melalui suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Asas ini dikenal sebagai asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*, yang dirumuskan di dalam Pasal 8 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 ditegaskan bahwa seseorang tidak dapat dikenai pidana tanpa adanya kesalahan atau asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*. Asas ini merupakan prinsip dasar untuk menentukan adanya kesalahan (*schuld*) dan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa putusan yang berisi pemidanaan oleh pengadilan hanya boleh dijatuhkan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut undang-undang, yang menimbulkan keyakinan bahwa seorang terdakwa dapat bertanggung jawab dan bersalah atas perbuatan yang didakwakan padanya. Kedua asas tersebut merupakan dasar perlindungan HAM bagi seorang tersangka dan terdakwa dari tindakan

sewenang-wenang penyidik, penuntut umum maupun hakim yang mengadili perkaranya.

Hak untuk memperoleh peradilan yang bebas, jujur dan tidak memihak, juga ditegaskan dalam UU Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 3

- (2) Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Pasal 4

- (1) Peradilan dilakukan "Demi keadilan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- (3) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar Kekuasaan Kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945.

Pasal 5

- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan".

Selanjutnya, untuk menjamin agar proses peradilan tidak bertindak sewenang-wenang dalam menentukan kesalahan seseorang, jalannya proses peradilan haruslah terbuka untuk umum. Hal ini dikenal sebagai asas keterbukaan (*publicitas*), sebagaimana telah pula dirumuskan di dalam Pasal 19 ayat (1), (2) dan Pasal 20 UU Nomor 4 Tahun 2004, sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pasal 20

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Asas keterbukaan (*publicitas*) tersebut merupakan suatu asas yang sangat mendasar untuk menjamin kebebasan peradilan. Jadi, prinsipnya setiap orang berhak untuk memperoleh peradilan yang bersifat terbuka, walaupun ada penyimpangan tertentu demi perlindungan kepentingan hukum berdasarkan undang-undang. Namun, sifat keterbukaan itu harus tetap ada walaupun pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

b. Macam-macam perlindungan hukum

Perlindungan hukum dari segi macamnya dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum pasif dan aktif³⁴. Perlindungan hukum pasif berupa tindakan-tindakan luar (selain proses peradilan) yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan atau kebijaksanaan berkaitan dengan hak-hak pelaku maupun korban. Sedangkan yang aktif dapat berupa tindakan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-haknya.

1. Perlindungan hukum pasif, diantaranya ialah :

a. Perlindungan HAM Dalam Hukum Pidana

Hukum dapat dirasakan dan diwujudkan dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam bentuk yang lebih rumit, wujud hukum tersebut dikendalikan oleh sejumlah asas-asas, doktrin, teori, atau filosofi hukum, yang diakui oleh sistem hukum secara universal³⁵.

Asas-asas atau doktrin hukum tersebut kemudian berkembang seiring pemilihan hukum. Dalam Hukum Pidana,

³⁴ Yana Indawati, *Handout Presentasi Victimologi 1 (rev)*, Surabaya, 2009, h. 49

³⁵ O.C. Kaligis, *loc.cit.*, h. 104

dikenal asas *nullum crimen sine lege* (tiada kejahatan dapat dihukum sebelum diatur dalam undang-undang)³⁶.

Dalam Hukum Pidana terdapat juga asas-asas yang berlaku spesifik, seperti asas *fair trial* atau asas peradilan yang berimbang. Asas peradilan yang berimbang ini tidak dapat dilepaskan dari asas *equality before the law* yang merupakan asas hukum umum dan dasar dari prinsip keseimbangan antara hak-hak seorang, tersangka dan terdakwa untuk membela dirinya manakala hak asasinya dilanggar, dengan hak-hak, kewenangan, bahkan kewajiban penyidik, penuntut umum dan juga hakim untuk menggunakan upaya paksa yang merampas hak-hak tersangka, terdakwa, dengan maksud mengatasi dan memberantas kejahatan.

b. Pemberian bantuan hukum struktural

Bantuan hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Adnan Buyung Nasution, dijelaskan bahwa adapun upaya yang dimaksud dalam definisi tersebut memiliki tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut ³⁷:

- a. Aspek perumusan aturan-aturan hukum ;
- b. Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan tersebut untuk ditaati dan dipatuhi ;

³⁶ *Ibid.*, h. 105

³⁷ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Penerbit LP3ES, Cetakan Kedua, Jakarta, 1982, h. 95

- c. Aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan tersebut dipahami.

Berkaitan dengan aspek pertama maka upaya yang dilakukan dalam kerangka bantuan hukum adalah melakukan kajian ulang terhadap seperangkat aturan-aturan hukum baik dalam bentuk perbaikan atau penambahan yang disesuaikan dengan nilai sosiologis. Hal ini bertujuan agar aturan-aturan hukum tersebut mampu mengakomodir dan menyesuaikan dinamika dan rasa keadilan masyarakat. Sedangkan aspek kedua masih kurang memperoleh perhatian dalam kegiatan bantuan hukum. Hal ini didasarkan pada alasan adanya faktor kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh organisasi bantuan hukum baik dalam bentuk dana dan tenaga ahli. Kondisi semacam ini tentunya membawa konsekuensi dalam hal mana organisasi-organisasi bantuan hukum tersebut harus melakukan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga lain untuk melakukan riset khususnya yang terkait dengan efektivitas peraturan. Format penelitian tersebut dapat juga dilakukan dengan cara studi komparatif di negara-negara lain yang memiliki permasalahan yang sama dengan negara Indonesia. Pada aspek yang terakhir maka diharapkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.

2. Perlindungan hukum aktif dapat berupa :

a. Upaya Hukum

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Adapun berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 KUHAP, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang dapat berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini³⁸.

Adapun maksud dari upaya hukum menurut pandangan doktrina pada pokoknya agar :

1. Diperoleh kesatuan dan kepastian dalam hal menjalankan peradilan (*operasi yustitie*).
2. Melindungi tersangka terhadap tindakan-tindakan yang bersifat sewenang-wenang dari hakim.
3. Memperbaiki kealpaan-kealpaan dalam dalam menjalankan peradilan.
4. Usaha dari para pihak, baik terdakwa maupun jaksa memberikan keterangan-keterangan baru (*novum*).

Jadi, dapat ditarik solusi dari ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHAP upaya hukum (*rechtsmiddelen*) berupa :

1. Terhadap putusan pengadilan negeri (peradilan tingkat pertama, yaitu :
2. Terhadap putusan pengadilan tinggi (peradilan tingkat banding) dapat diajukan permohonan kasasi pihak (*kasasi partij*) dan kasasi demi kepentingan hukum oleh jaksa agung.
3. Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat diajukan peninjauan kembali (*herziening*).

Akan tetapi, sesuai dengan permasalahan yang diangkat mengenai perlindungan hukum bagi terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum di persidangan pidana, maka di

³⁸ Lilik Mulyadi, *op.cit.*, h. 234-235

sini penulis hanya memfokuskan pada upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali.

Berdasarkan Pasal 263 KUHAP yang dirumuskan sebagai berikut :

Pasal 263

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :
 - a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Kesimpulannya yaitu terhadap putusan pengadilan (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung) yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar³⁹ :

³⁹ HMA KUFFAL, *op cit.*, h. 394

- a. Apabila terdapat "keadaan baru" yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu "kekhilafan hakim" atau suatu kekeliruan yang nyata.

b. Keseimbangan Upaya Paksa.

Dalam hal tindak pidana, seorang warga negara berhadapan dengan negara secara langsung. Negara berdasarkan legitimasi yang diperolehnya dari rakyat dan pemerintah berdasarkan legitimasi yang diperolehnya dari konstitusi menjalankan tugas memerintah rakyat. Seorang yang dituduh melakukan tindak pidana selalu berada dalam posisi yang sangat lemah dibandingkan posisi negara. Polisi sebagai bagian dari pemerintah/eksekutif berwenang untuk menangkap dan menahan seorang tersangka. Alasan penahanan yang digunakan adalah agar tersangka tidak menghambat tugas penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti yang akan digunakan untuk mendakwanya. Pada kondisi seperti ini, terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk membela dirinya ketika polisi menyiksanya baik secara fisik maupun mental.

Penahanan merupakan salah satu bentuk upaya paksa (*dwang middelen*). Dalam menjalankan tugasnya, penyidik dilengkapi dengan kekuasaan dan wewenang yang sah untuk menjalankan upaya paksa (*dwang middelen*) terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Namun, di pihak lain, wewenang menjalankan upaya paksa (*dwang middelen*) tersebut menunjukkan praktik-praktik yang telah menjurus kepada pelanggaran HAM tersangka itu sendiri.

Pandangan bahwa penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*) dibutuhkan agar tersangka tidak menghalangi atau mempersulit tindakan penyidikan, telah menjadi dasar bagi penyidik untuk merampas kemerdekaan seseorang dengan menangkap serta menahannya. Penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*) merupakan kekuasaan penyidik yang diberikan oleh undang-undang secara terbatas. Artinya terdapat kondisi-kondisi tertentu baik sebelum maupun pada saat seorang tersangka ditahan. Kondisi-kondisi tersebut adalah⁴⁰:

1. Penangkapan dan penahanan hanya dilakukan berdasarkan bukti (permulaan) yang cukup [vide Pasal 17 KUHAP];
2. Penahanan hanya demi kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan [vide Pasal 20 KUHAP];
3. Penahanan mempunyai batas waktu [vide Pasal 20 KUHAP];
4. Perintah penahanan harus berdasarkan bukti yang cukup dan adanya kekhawatiran tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya [vide Pasal 21 ayat (1) KUHAP];
5. Setiap penahanan harus memenuhi ketentuan prosedur administratif yang sah dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang [vide Pasal 21 ayat (2) dan (3) dan Pasal 24-28 KUHAP];
6. Penahanan bersifat fakultatif, kecuali untuk kejahatan-kejahatan tertentu [vide Pasal 20 ayat (4) KUHAP];

⁴⁰ O.C. Kaligis, *op.cit.*, h. 211-214

7. Lamanya waktu penahanan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, jika kemudian tersangka terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya;
8. Selama dalam tahanan, tersangka diperlakukan dengan manusiawi dan tidak boleh disiksa atau ditekan atau direndahkan martabatnya sebagai manusia [vide Pasal 66, Pasal 117, dan Pasal 122 KUHAP];
9. Dalam waktu 24 jam setelah ditahan, tersangka harus diperiksa. Akan tetapi, dalam praktik, karena tidak diatur tentang apakah diperiksa 1 kali, 2 kali atau 10 kali, ketentuan yang mendukung asas peradilan yang cepat, tepat dan sederhana, tidak berjalan baik.

Penahanan sebagaimana dimaksud di atas pada dasarnya bertentangan dengan HAM karena berarti menghukum seseorang sebelum kesalahannya dibuktikan dengan putusan pengadilan. Penahanan selalu mengandung kontroversi karena bertentangan dengan HAM dan menganggap seseorang berbahaya bagi masyarakat padahal dalam kenyataannya sulit memperkirakan siapa yang berbahaya.

Oleh karena itu, suatu penahanan dilakukan menurut standar yang tegas (*stringent standard for detention*) dan terbatas, yang meliputi:

1. Dugaan kuat (*reasonable cause*);
2. Penahanan sebagai tindakan pencegahan (*preventive detention*).

Di satu sisi, seorang penyidik atau penuntut umum diberikan kekuasaan yang sangat besar untuk melakukan upaya paksa (*dwang middelen*). Secara teoretis terdapat batasan-batasan bagi pelaksanaan upaya paksa (*dwang middelen*) tersebut. Namun, karena sifatnya tidak tertulis secara tegas dalam ketentuan hukum positif, mudah sekali bagi penyidik atau penuntut umum untuk mengabaikan batasan-batasan tersebut. Dalam kondisi ini dapat dikatakan bahwa tidak ada keseimbangan antara upaya paksa (*dwang middelen*) yang dimiliki oleh penyidik atau penuntut umum dengan lembaga yang juga dapat memaksa penyidik atau penuntut umum untuk mematuhi batasan-batasan tersebut diatas.

Sebagaimana telah diungkapkan di atas, upaya paksa (*dwang middelen*) pada dasarnya merupakan pelanggaran HAM, khususnya hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Karena itu, pelaksanaan upaya paksa (*dwang middelen*)

tersebut perlu diawasi dengan porsi yang seimbang. Pengertian seimbang berarti tidak mengurangi penting dan sahnya wewenang penyidik atau penuntut umum untuk menjalankan upaya paksa (*dwang middelen*), tetapi merupakan kontrol positif agar penyidik atau penuntut umum tetap memperlihatkan hak-hak asasi seorang tersangka atau terdakwa.

Ketiadaan lembaga bagi seorang tersangka untuk membela dirinya apabila hak-haknya sebagai manusia dilanggar, telah menimbulkan berbagai penyimpangan akibat penggunaan kekuasaan penyidik yang terlalu besar dan cenderung dengan cara-cara yang tidak terkendali lagi. Lembaga yang sudah ada seperti Praperadilan, ternyata tidak mampu mengatasi penyimpangan atau pelanggaran hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Lingkup Praperadilan sangat sempit, berdasarkan Pasal 77 KUHAP, Praperadilan hanya mengenai 3 (tiga) hal, yaitu :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan;
- b. Sah atau tidaknya penahanan;
- c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan/penuntutan.

Sementara itu, dalam praktik terjadi perbuatan-perbuatan penyidik dan penuntut umum yang sangat merugikan HAM seseorang yang tidak termasuk dalam lingkup kasus Praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP.

Berdasarkan uraian diatas mengenai keseimbangan upaya paksa (*dwang middelen*), maka diperlukan suatu bentuk perluasan kontrol terhadap upaya paksa (*dwang middelen*) dalam kerangka KUHAP untuk menjamin perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa, khususnya hak untuk mendapatkan pendampingan penasihat hukum. Atau dengan perkataan lain, untuk menekan kemungkinan terjadinya kegagalan, sistem Peradilan Pidana menetapkan prosedur upaya paksa (*dwang middelen*) yang seimbang.

4. Hak-hak Terdakwa

a. Hak-hak Terdakwa Menurut KUHAP

Pada Ketentuan dalam KUHAP telah diatur beberapa pasal yang memiliki keterkaitan dengan hak-hak terdakwa. Adapun pasal-pasal tersebut diatur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP.

Hak-hak terdakwa tersebut meliputi hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam phase penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga.

Sedangkan hak-hak terdakwa yang terkait dengan pendampingan penasihat hukum dapat diuraikan sebagai berikut :

Pada ketentuan dalam pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP menyebutkan bahwa tersangka berhak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum dan terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. Selanjutnya disebutkan dalam pasal 51 KUHAP, untuk mempersiapkan pembelaannya, tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang

disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Hak untuk diam, dalam arti tidak mengeluarkan pernyataan ataupun pengakuan. Jadi, tidak diperkenankan adanya tekanan-tekanan tertentu. Hak tersebut dinyatakan dengan tegas di dalam Pasal 52 KUHAP⁴¹, yang merumuskan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Kemudian dalam pasal 53 KUHAP menjelaskan, pada pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 KUHAP, dalam hal tersangka atau terdakwa bisu atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 KUHAP.

Guna kepentingan Pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini, sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 KUHAP.

Mengenai Pasal 54 KUHAP yang telah disebutkan di atas bila dikaitkan dengan Pasal 115 KUHAP yang bunyi pasalnya :

⁴¹ O.C. Kaligis, *op.coit.*, h.114

Pasal 115

- (1) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta-mendengar pemeriksaan.
- (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Maka hak mendapatkan bantuan hukum dalam pemeriksaan penyidikan adalah pasif⁴². Berarti seandainya pun penasihat hukum diperkenankan oleh pejabat penyidik mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan, kedudukan dan kehadiran penasihat hukum mengikuti tidak lebih sebagai "penonton". Kedudukan dan kehadirannya hanya terbatas "melihat atau menyaksikan" dan "mendengarkan" jalannya pemeriksaan (*within sight and within hearing*). Bahkan kedudukan yang bersifat pasif tersebut dalam pemeriksaan penyidikan yang bersangkutan-paut dengan kejahatan terhadap keamanan negara, dikurangi lagi, penasihat hukum dapat dan boleh mengikuti jalannya pemeriksaan, tapi tiada lebih daripada hanya "melihat" saja jalannya pemeriksaan. Penasihat hukum tidak boleh mendengar isi dan jalannya pemeriksaan (*within sight but not within hearing*)⁴³.

Pada pasal 55 KUHAP untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya.

Untuk menghubungkan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai bahan analisa mengenai Terdakwa yang tidak

⁴² Yahya Harahap, *op.cit.*, h. 334

⁴³ *Ibid*,

didampingi penasihat hukum, maka disini akan dijelaskan mengenai "*Miranda Rule*".

Miranda Rule adalah merupakan hak konstitusional dari tersangka yang meliputi hak untuk tidak menjawab atas pertanyaan pejabat yang bersangkutan dalam proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan penasihat hukum sejak dari proses penyidikan sampai dan/atau dalam semua tingkat proses peradilan. *Miranda Rule* adalah merupakan hak konstitusional yang bersifat universal di hampir semua negara yang berdasarkan hukum. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum pada dasarnya sangat menghormati *Miranda Rule* ini, dan komitmennya terhadap penghormatan *Miranda Rule* telah dibuktikan dengan mengadopsi *Miranda Rule* ini ke dalam sistem hukum acara pidana yaitu sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP⁴⁴.

Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP menentukan bahwa: Pertama, dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Kedua, setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHAP mengatur tentang. Pertama, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Kedua, tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing

⁴⁴ M. Sofyan Lubis, *op.cit.*, h. iii

yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

b. Hak-hak Terdakwa Di Luar Ketentuan KUHAP

Hak didampingi oleh Penasehat Hukum adalah termasuk syarat akan nilai-nilai hak asasi manusia, hak tersebut dilindungi oleh undang-undang terutama Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan adanya hak didampingi Penasehat Hukum telah diakui secara universal sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah diatur beberapa pasal yang memiliki keterkaitan dengan hak-hak terdakwa. Adapun pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 5

- (2) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
- (4) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah,

sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Bab VII tentang Bantuan Hukum Pasal 37 yang merumuskan bahwa : "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum".

5. Sistem Pembuktian

Dalam hukum acara pidana (KUHP) terdapat cara mempergunakan alat bukti, yakni *sistem negatief* menurut undang-undang (*negatief wettelijk*) yang termuat dalam pasal 183 KUHP.

Pasal 183 KUHP berbunyi :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya."

Apa yang terkandung dalam pasal 183 KUHP ialah :

- a. Sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah;
- b. Dan dengan dasar alat bukti yang sah itu hakim yakin, bahwa;

Kata "sekurang-kurangnya" dua alat bukti, yang memberikan limitatif dari bukti yang minimum, yang disampaikan pada acara

pembuktian. Alat bukti yang sah tersebut terdapat dalam pasal 184 KUHAP, yakni :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa
6. Apa yang disebut *notoir* tidak perlu dibuktikan.

Jadi, pasal 183 menetapkan adanya dua bukti minimum, yakni misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat dan seterusnya terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat-alat bukti yang sah.

Dalam sistem *negatife wettelijk* ada dua hal yang merupakan syarat⁴⁵ :

- a. *Wettelijk*, oleh karena alat-alat bukti yang sah dan yang ditetapkan oleh undang-undang;
- b. *Negatief*, oleh karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang saja, belum cukup untuk memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah dibuktikan adanya keyakinan hakim.

Dengan demikian antara alat-alat bukti dengan keyakinan diharuskan adanya hubungan *causal* (sebab akibat).

Pasal 183 KUHAP mensyaratkan adanya dua alat bukti yang sah dan yang ditetapkan undang-undang dan keyakinan hakim, bahwa tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.

⁴⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan alat-alat Bukti*, Cetakan Pertama, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h.14

Sehingga meskipun terdapat empat, lima atau enam saksi yang diajukan, akan tetapi hakim pidana tidak yakin, bahwa tindak pidana itu telah terjadi dan dilakukan oleh terdakwa dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu, sistem KUHAP menganut sistem *negatief wettelijk*, tidak mengizinkan hakim pidana untuk menggunakan atau menerapkan alat-alat bukti lain yang tidak ditetapkan oleh undang-undang, dalam hal ini yang ditetapkan oleh pasal 184 KUHAP. Dengan demikian misalnya, maka alat berupa “pengetahuan hakim” tidak merupakan alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang melalui pasal 184 KUHAP.

Di samping pasal 183 KUHAP, maka asas *negatief wettelijk* tercermin pula secara nyata pada pasal 189 ayat (4) KUHAP, bahwa berdasarkan “pengakuan salah” saja, hakim tidak boleh menghukum terdakwa. “Pengakuan salah” tanpa alat bukti lain, merupakan alat pembuktian yang tidak lengkap (*onvoldoende bewijs*).

Untuk jelasnya pasal 189 ayat (4) KUHAP, dikutip sebagai berikut :
 “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”

Juga walaupun hakim yakin, bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi keyakinan hakim ini hanya dilandasi oleh suatu alat bukti yang berupa keterangan terdakwa, maka putusan demikian merupakan tindakan yang melanggar asas daripada bukti minimum yang diminta oleh undang-undang (*de leer van het minimum bewijs*) sebagaimana termuat dalam pasal 183 KUHAP.

Adalah lain halnya dengan ajaran pembuktian yang dikenal dengan *convention intime*. Ajaran ini disandarkan semata-mata atas keyakinan belaka, dan tidak terikat kepada aturan-aturan, hingga keyakinan menurut aliran ini sangat subjektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Sistem ini tidak dianut dalam peradilan umum atau tidak dianut dalam KUHAP. Contoh dari sisitem ini dipergunakan dalam peradilan yuri.

Lain lagi ajaran pembuktian yang dikenal dengan *positief wettelijk*. Ajaran ini disandarkan semata-mata kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tanpa adanya keyakinan hakim.

Dengan demikian misalnya jika peraturan menetapkan, bahwa dalam pembuktian dipergunakan dua alat bukti saja, sudah cukup untuk menentukan apakah kesalahan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, maka hakim harus menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, tanpa adanya unsur keyakinan hakim. Contoh: dalam suatu kasus perkara pidana telah diperiksa dua orang saksi yang mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka hakim mesti menghukum terdakwa, meskipun ia tidak yakin.

Ajaran *positief wettelijk*, hanya dipergunakan dalam hukum acara perdata.

Ada ajaran yang hampir-hampir mirip dengan ajaran *negatief wettelijk*, yaitu yang dikenal dengan *convention raisonee*. Ajaran ini disandarkan semata-mata atas keyakinan atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang diluar ketentuan perundang-undangan.

Hakikat pembuktian ialah mencari kebenaran akan peristiwa-peristiwa hingga dengan demikian akan diperoleh kepastian bagi hakim kebenaran peristiwa tertentu. Sengketa perdata dibawa ke persidangan dengan maksud untuk memperoleh keputusan yang seadil-adilnya, sedangkan perkara pidana dibawa ke persidangan dengan maksud untuk memperoleh keputusan yang setimpal atas perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara pembuktian dalam perkara perdata dan dalam perkara pidana, di mana unsur keyakinan hakim dipersyaratkan bagi perkara pidana dan dalam perkara perdata tidak disebutkan sebagai syarat akan adanya keyakinan hakim itu.

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan tentang kekuatan penilaian alat-alat bukti ini, apakah alat-alat bukti termuat dalam pasal 184 KUHAP dapat digunakan perasing-asingan atau dapat digunakan berhubung-hubungan, dapat mengadakan keyakinan hakim. Demikian pula, tidak ada ketentuan apakah alat bukti tersebut dapat dilemahkan dengan bukti penyangkal.

Ketiadaan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka segala penggunaan alat bukti yang sah dan ditentukan oleh undang-undang diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, dengan berpegang pada prinsip atau asas *negatief wettelijk*.

6. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.⁴⁶

Menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 Pasal 1, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁴⁷

Penggolongan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

⁴⁶ Makaro, Suhasril, Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, h. 16

⁴⁷ Pasal 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁴⁸ Pasal 6 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

b. Jenis-Jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana disebut diatas, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah sebagai berikut:⁴⁹

a. Candu atau disebut juga dengan Opium

Berasal dari sejenis tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat.

b. Morphine

Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, di mana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

c. Heroin

Berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, sangat berbahaya bila di konsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

d. Cocaine

Berasal dari tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu

⁴⁹ Moh Taufik Makaro, Suharsil, Moh Zakky, *op.cit.*, h.21-25

dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia.

e. Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari dammar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari hashis lebih kuat dari ganja.

f. Narkotika sintesis atau buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi dan kesadaran.

7. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut⁵⁰.

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas tentang Terdakwa yang didakwa dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih

⁵⁰ *Ibid.*, h.41

yang tidak mendapatkan pendampingan penasihat hukum, dimana terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika, yaitu melanggar Pasal 111 Undang-Undang Narkotika, maka dicantumkan bunyi pasalnya sebagai berikut :

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan⁵¹.

2. Pendekatan Masalah

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Untuk itu peneliti harus

⁵¹ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 30

melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut⁵²:

1. *Comprehensif* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis
2. *All inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada. Sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
3. *Systematic* bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

Analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), akan lebih akurat bila dibantu oleh pendekatan yang lain dalam hal pendekatan tersebut adalah pendekatan kasus (*case approach*), yang bertujuan untuk mempelajari penerapan-penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang telah terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum⁵³.

⁵² Ibrahim Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, PT. Bayu Media Publishing, 2010, hal. 303

⁵³ *Ibid*, h. 321

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di mana ditemukannya data-data penelitian⁵⁴. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah :

- a) Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara terstruktur yang diperoleh peneliti langsung dari objeknya.
- b) Sumber Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan⁵⁵. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
 - 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian⁵⁶.

⁵⁴ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007, h. 98

⁵⁵ H. Zainuddin Ali, *op.cit.*, h. 106

⁵⁶ Ibrahim Jhonny, *op.cit.*, h. 296

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, encyclopedia, dan lain-lain⁵⁷.

4. Metode Pengumpulan dan Pengelolahan data

Cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu :

- a) Data primer dikumpulkan dengan cara studi lapangan, yaitu wawancara kepada pihak terkait yang dalam hal ini adalah terdakwa yang tidak didampingi dengan penasihat hukum yang telah di putus perkaranya oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo, wawancara tersebut menggali informasi mengenai faktor yang menyebabkan terdakwa tidak didampingi penasihat hukum.
- b) Data sekunder dikumpulkan dengan cara studi dokumen atau pustaka yaitu dilakukan dengan mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematiskan, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku⁵⁸. Dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisis berbagai data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian.

⁵⁷ *Ibid*,

⁵⁸ *Ibid*,

5. Metode Analisis Data

Pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis artinya data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian⁵⁹.

Pengkajian deskriptif analitis digunakan untuk menelaah konsep-konsep yang mencakup pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini sangat berkaitan dengan tugas ilmu hukum normatif (dogmatik) yaitu untuk menelaah, mensistemasi, menginterpretasikan dan mengevaluasi hukum positif yang berlaku bagi pengkajian tentang pokok masalah⁶⁰.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri beberapa sub-sub :

Bab I pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini serta sistematika penulisan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan

⁵⁹ H. Zainuddin Ali, *op.cit.*, h. 107.

⁶⁰ Ibrahim Jhonny, *op.cit.*, h. 36.

pengertian kepada pembaca agar dapat mengetahui secara garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Bab II, menguraikan tentang bentuk perlindungan hukum bagi terdakwa yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak didampingi dengan penasihat hukum pada persidangan di pengadilan. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu, pertama mengenai disposisi kasus perkara No : 619/Pid.B/2010/PN Sda. Kedua, mengenai analisa bentuk perlindungan hukum bagi terdakwa tanpa didampingi penasihat hukum.

Bab III, menguraikan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terdakwa tidak didampingi penasihat hukum. Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu, pertama faktor internal yang menyebabkan terdakwa tidak didampingi penasihat hukum. Kedua, faktor eksternal yang menyebabkan terdakwa tidak didampingi penasihat hukum. Ketiga, analisis putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 619/Pid.B/2010/PN.Sda.

Bab IV, penutup merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.